

## **Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang**

Implementation Of Early Childhood Education (PAUD) Policies In Sintang Sub-District

**Kiam**

**kiam.diknas@yahoo.com**

Program Pascasarjana Universitas Terbuka  
Graduate Studies Program Indonesia Open University

### **ABSTRAK**

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang. Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meng- etahui dan menganalisis (1) proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang. Penelitian ini di laksanakan di lembaga pendidikan nonformal PAUD yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan Mulia yang, PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati. Sumber penelitian ini adalah guru PAUD di Kecamatan Sintang. Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yayasan atau organisasi, masih belum sinergis antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama, banyak PAUD di Kecamatan belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik, dikarenakan minimnya lulusan Sarjana untuk PAUD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) RI Nomor 58 tahun 2009, untuk sarana dan prasarana masih sangat kurang, pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD. Supaya proses implementasi kebijakan pendidikan PAUD non formal berjalan lancar, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: menyekolahkan guru PAUD ke SI PAUD. Masyarakat diharapkan juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD. Memberikan tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

**Kata kunci:** Implementasi, Pendidikan Non Formal, PAUD.

## ABSTRACT

Implementation of non-formal early childhood education has many benefits, one of which is to provide opportunities for children to meet physical and spiritual needs as well as develop talents. This study aimed to identify and analyze (1) the process of implementation of the non-formal education policy with regard to early childhood education (PAUD) in Sintang (2) the factors that affected the implementation of PAUD in Sintang. This study was carried out at non formal PAUD institutions, Sintang sub-district in school year 2012/2013. Those were PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria and PAUD Pelita Hati. The respondents were PAUD teachers in Sintang sub-district. The results showed that the process of implementation of non-formal PAUD in Sintang sub-district were not going well. This was due to the lack of government support in the implementation. Cooperation between PAUD organizations and the government still was not synergistic. Cooperation between the managers of PAUD institutions and the public to monitor and control was lacking. Many PAUD in the sub-district did not meet the qualifications as an educational institution due to the lack of PAUD university graduates which were recruited as teachers. In short, factors affecting the implementation of non-formal PAUD in Sintang were: standards of education and educational personnel were not met, the educators and the educational processes have not met qualifications, teachers' competence did not comply with the national standards. Early childhood programs and planning in the district was not proceeding according to the Minister of National Education Regulation (Permendiknas) No. 58 of 2009: facilities and infrastructure were still lacking, and early childhood cooperation involving government, private and public was not there. To facilitate cooperation there should be a coordinating agency for PAUD. If the process of implementation of non-formal should improve, then the following actions had to be taken (1) to upgrade PAUD teachers to the university graduate (S1) level. (2) To persuade communities to also be involved in the control / monitoring, assessment, decision-making and implementation of PAUD. There should also be additional funding to increase the facilities and infrastructure.

**Keywords:** *Implementation, Non Formal Education, Early Childhood (PAUD)*

## LATAR BELAKANG

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui 3 jalur yaitu : Pertama, jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; Kedua, jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat dan ketiga, jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan adanya berbagai hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode kritis. Anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai sekitar usia sekolah (7 tahun) ternyata tidak benar, pendidikan yang dimulai pada saat Taman Kanak-Kanak (4-6 tahun) sebenarnya sudah terlambat. Menurut hasil penelitian di bidang neurologi pada usia tersebut otak pertama separuh kapasitas kecerdasan manusia sudah

terbentuk, apabila pada usia tersebut otak tidak mendapat rangsangan yang maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal.

Salah satu jalur terselenggaranya PAUD adalah jalur pendidikan non formal. PAUD jalur non formal adalah pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara fleksibel sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilaksanakan melalui Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Selain itu juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak-anak memiliki sifat-sifat, nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu usaha untuk mendorong bentuk PAUD non formal terus menerus jadi perhatian kita semua khususnya pemerintah.

Sampai saat ini, implementasi kebijakan pada pendidikan non formal anak usia dini ternyata belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi pemerintah atau kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan non formal anak usia dini, antara lain kurangnya perhatian terhadap tenaga kependidikan, kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap tenaga pendidik, kurangnya perhatian pemerintah daerah Sintang terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan, sehingga apabila terus dibiarkan nantinya akan berdampak pada lembaga pendidikan PAUD terbengkalai bahkan terancam tutup. Oleh karena itu agar dampak tersebut dapat dihindari maka diperlukan perhatian terhadap implementasi kebijakan program pendidikan non formal anak usia dini khususnya PAUD yang berada di Kecamatan Sintang.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: bagaimana proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses serta faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang.

## **KAJIAN TEORI DAN LITERATUR**

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat, maka kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial terapan yang berperan sebagai *problem solver* ( Kismartini, dkk; 2010: 2.3). Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988: 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang

terarah. James E. Anderson (1978, 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson, 1979:3).

## PENGERTIAN IMPLEMENTASI

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jones (1991:120), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tujuan PAUD adalah untuk membantu anak meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya (PP No. 27/1990 pasal 3).

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tentang Standar Pendidikan Usia Dini bagian pendahuluan menjelaskan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤ 6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – < 2 tahun, 2 – < 4 tahun, 4 – ≤ 6 tahun, dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 – ≤ 6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 0 – ≤ 4 tahun dan 4 – ≤ 6 tahun.

Ekowarni dalam Buletin PAUD Vol.8 No.1 (2009 : 1) menjelaskan susunan standar PAUD terdiri dari : Standar tingkat pencapaian perkembangan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar program, dan Standar layanan. Standar tingkat pencapaian merupakan deskripsi tentang perkembangan yang berhasil dicapai anak pada suatu tahap tertentu berdasarkan usia anak. Standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari Guru PAUD, Tutor PAUD, serta Pengasuh PAUD. Standar program PAUD meliputi isi, kegiatan, proses, dan penilaian. Standar layanan terdiri dari sarana, prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Sarana pendidikan meliputi Alat Permainan Edukatif (APE) di luar ruangan, Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam ruangan, perlengkapan musik dan seni, perlengkapan olahraga, poster, buku dan alat tulis, serta alat elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode ini merupakan tipe penelitian yang bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000: 15).

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pendidikan nonformal PAUD yang berada di Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan Mulia yang berada di Jl. MT. Haryono, PAUD Taman Ceria yang berada di Jl. Dharma Putra Komplek Citra Baning Permai Blok D. 13 dan PAUD Pelita Hati yang berada di Jl. MT. Haryono Komplek BTN. Ciptamandiri I C/28.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dari hasil pengamatan terhadap Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013.

Sumber penelitian dalam penelitian adalah guru PAUD di Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013.

## **HASIL PENELITIAN**

Secara keseluruhan, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan masih menunjukkan belum terciptanya manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien. Belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai. Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh pemerintah Kabupaten Sintang, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pembangunan pendidikan, menjadi penyebab lainnya.

Ditengah keterbatasan tersebut Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya memberikan penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis pendidikan bagi para guru pendamping, sehingga dapat bekerja secara profesional. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PAUD melalui perbaikan sistem manajemen informasi, asistensi dan advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi dan sertifikasi serta dapat menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan merata.



Usaha pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang Pemerintah Kabupaten Sintang juga membantu meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas PAUD pada Kecamatan Sintang melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan. Pemerintah juga mengembangkan model dan program percontohan. Model penyelenggaraan program PAUD di Kecamatan Sintang menggunakan model kemitraan, pendekatan kewilayahan, dan bantuan penyelenggaraan program.

Berkaitan dengan *policy stakeholder* dan *policy environment* yang terlibat dalam pendidikan non formal pada PAUD secara garis besar terdiri atas tiga bagian pokok yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Lembaga PAUD, serta Orang Tua siswa. Ketiga bagian ini merupakan kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya serta sebagai penentu kualitas dan kuantitas mutu pelayanan pendidikan anak usia dini. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sintang adalah :

1. Penyusunan Rencana Pembelajaran

Dari lembaga PAUD yang diteliti penyusunannya dari rencana tahunan, rencana persemester, rencana bulanan, rencana mingguan, dan rencana harian yang semuanya berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah metode *Beyond Centres and Circle Time*, meskipun metode tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

2. Standar Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa belum semua PAUD di Kecamatan Sintang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru memenuhi kriteria berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

3. Kebijakan dan Perencanaan PAUD.

Dalam pelaksanaannya lembaga PAUD melaksanakan kegiatan berdasarkan visi, misi, dan tujuan lembaga dengan tetap berpedoman pada Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009.

4. Sarana, Prasarana, Perkembangan Siswa dan Pembiayaan

Dari penelitian ditemukan bahwa belum ada satu lembaga PAUD di Kabupaten Sintang yang bisa memenuhi ketentuan PP RI Nomor 19 Tahun 2005. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai sehingga lembaga PAUD mengandalkan iuran bulanan orang tua siswa untuk kegiatan operasional dan pemenuhan sarana dan prasarana.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan – Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Pembangunan PAUD melibatkan berbagai institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Instansi pelaksana hanya disebutkan dua, yaitu Depdiknas dan Depag, padahal Depkes dan Depsos juga terlibat dalam pembangunan PAUD. Kebanyakan program PAUD masih berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergi antar program yang ada di masyarakat. Sinergisitas berbagai unsur yang berkepentingan dalam pembinaan anak merupakan kunci keberhasilan upaya pembinaan anak. Jaringan kemitraan merupakan kunci efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan, selama ini tumpang tindih program termasuk pembinaannya, merupakan kesalahan sebagai akibat tidak berjaya jaringan kemitraan termasuk koordinasi sebagai salah satu komponennya. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan terutama dalam mengatur

regulasi, mensosialisasikan regulasi kepada masyarakat hingga mengatur standar umum PAUD baik program maupun penilaian. Berkaitan dengan program kegiatan, permendiknas nomor 58 tahun 2009 belum cukup untuk dijadikan acuan diperlukan aturan teknis maupun standar umum mengenai kegiatan pokok pembelajaran sehingga tidak ada beda persepsi dan interpretasi dari masing – masing PAUD dalam melaksanakan peraturan tersebut. Yang perlu diatur oleh pemerintah adalah juklak juknis turunan permendiknas tersebut yang berkaitan dengan materi pokok, sedangkan materi lokal atau tambahan diberikan kebebasan bagi setiap lembaga PAUD untuk mengembangkan ide, kreasi, dan kreativitas sesuai ciri khas dan karakteristik setiap lembaga PAUD.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan :
  - a. standar kualifikasi akademik dan kompetensin guru PAUD belum sepenuhnya memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007, tetapi saat ini sudah banyak guru PAUD sekolah melalui Universitas Terbuka.
  - b. belum meratanya lembaga layanan PAUD sehingga untuk daerah yang terpencil kurang perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang
  - c. Pemerintah Kabupaten Sintang, pengelola lembaga dan masyarakat masih belum bisa bersama-sama melakukan pengontrolan dan pengawasan
  - d. sarana dan prasarana untuk PAUD dirasa masih sangat kurang, karena untuk gedung dan sarana bermain anak masih sangat kurang
  - e. penganggaran yang di berikan Pemerintah Kabupaten Sintang masih sangat kurang, PAUD masih sangat mengandalkan uluran tangan dari orang tua.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang adalah:
  - a. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, di Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Sintang masih sangat kurang.
  - b. Kebijakan dan perencanaan PAUD. Pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sintang sudah memiliki Visi dan Misi. Untuk program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009.
  - c. Sarana, prasarana, perkembangan siswa dan pembiayaan. Untuk sarana dan prasara masih sangat kurang, koleksi buku dan permainan juga masih sangat terbatas. Perkembangan siswa dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini membuktikan bahwa orang tua semakin sadar bahwa anak usia dini harus dimasukkan di PAUD. Pembiayaan masih sangat tergantung dari orang tua murid, sehingga PAUD juga sangat terbatas untuk meningkatkan fasilitas. Bantuan dari pemerintah masih dirasa sangat kurang.
  - d. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD, hal ini belum dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Guna mendukung proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: menyekolahkan guru PAUD, banyak mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru pendamping PAUD, memberikan fasilitas sarana dan prasarana khususnya bagi PAUD yang kurang mampu, memberikan pengawasan dan pengontrolan secara kontinyu.
2. Pemerintah, lembaga/ organisasi/ yayasan dan masyarakat diharapkan terlibat bersama dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan program PAUD non formal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat mengalokasikan Dana APBD dalam memperbaiki Sarana dan Fasilitas guna menunjang kegiatan program PAUD non formal di Kabupaten Sintang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James A, 1979. *Public Policy Making*. Praeger Publishers. New York.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Konteporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Publik Policy*, Congressional Quarterly Press. Washington DC.
- Dunn, Wulliam, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Terjemahan Wibawa, dkk, Gajah Mada Universty Press. Yogyakarta.
- Gutama. 2007. *Panduan Kerjasama dengan Organisasi Mitra Paud*. Jakarta: Depdiknas Dirjen PLS Dikpen Anak Usia Dini.
- Jalal, Faisal. 2002. Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Mendasar. *Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini*. Vol. 03. Hal 4 – 8.
- Kismartini, dkk. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Matter Donal S, Van and Carl E. Van Horn, 1984. *The Policy Implementation Proces*. Sage Publication, Beverly Hills.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi ke 24. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton.,V. C., Sawichi, S.D., *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Prentice Hall. USA.



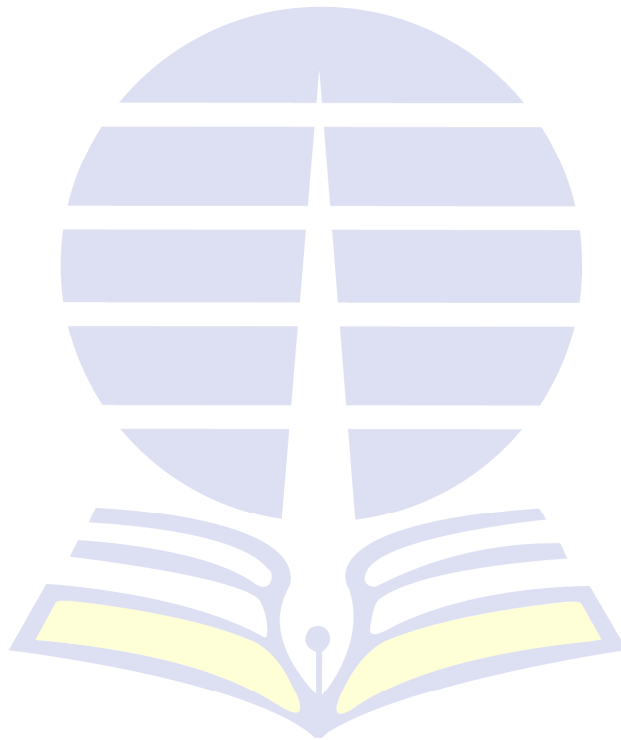
Santoso, Soegeng. 2002. Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Wahab, Solichin, Abdul, 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rieneka Cipta. Jakarta.

Winarno, Budi, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.



UNIVERSITAS TERBUKA